

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Provinsi Bali pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,67 persen (yoy), mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar 2,77 persen (yoy). Angka ini juga menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Bali berada di atas tingkat inflasi Nasional, yang pada periode yang sama mencapai 3,05 persen (yoy). Secara bulanan (month to month / m-t-m), Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi sebesar 0,93 persen. Sementara secara year to date (y-t-d), tercatat inflasi sebesar 1,46 persen.

Secara year on year (yoy), Kota Denpasar tercatat mengalami inflasi sebesar 0,87% (mtm) atau 3,43% (yoy), kemudian Badung mengalami inflasi sebesar 1,10% (mtm) atau 3,92% (yoy), Singaraja mengalami inflasi sebesar 0,89% (mtm) atau 3,71% (yoy), dan Tabanan mengalami inflasi sebesar 0,91% (mtm) atau 3,95% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada bulan Maret 2024 antara lain beras, daging ayam ras, tomat, cabai merah, bawang putih. Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi dengan memberikan sumbangan negatif, antara lain bawang merah, cabai rawit, minyak goreng.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi m-t-m pada bulan Maret 2024 antara lain daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, canang sari. Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi dengan memberikan sumbangan negatif, antara lain cabai merah, dan kentang.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi dengan melakukan identifikasi penyebab perubahan harga, sbb:

1. Harga daging ayam ras meningkat karena pasokan daging ayam ras belum kembali normal dipasar. Penurunan pasokan daging ayam ras karena terjadi perlambatan pasokan ayam potong akibat dari harga pakan ayam yang masih tinggi. Hal ini mengakibatkan produksi peternak menurun.
2. Harga bawang putih meningkat karena didorong adanya kenaikan harga bawang putih di negara pengekspor seperti Tiongkok. Pasokan bawang putih di Bali banyak didatangkan dari Surabaya yang lebih dari 90% bersumber dari impor Tiongkok.
3. Harga tomat meningkat karena terjadinya gagal panen di sejumlah lahan petani akibat cuaca yang tidak menentu sehingga berimbas pada minimnya pasokan ke pedagang di pasar tradisional.
4. Harga canang sari meningkat pasca peningkatan permintaan pada HKBN lalu dan terbatasnya bahan baku akibat faktor cuaca.
5. Harga beras masih meningkat karena pasokan beras belum normal dipasarkan. Produksi beras menurun karena faktor cuaca, gabah masih terbatas di Bali dan Jawa karena belum semua wilayah memasuki musim panen. Panen raya di Bali diprediksi pada bulan Maret-April 2024. Disamping itu, permintaan gabah Bali oleh pedagang dari Jawa meningkat karena kualitasnya yang bagus sehingga gabah Bali dipergunakan sebagai campuran gabah lokal untuk menghasilkan beras premium.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pilar 4 K	KEBIJAKAN/ PROGRAM
<b>Keterjangkauan Harga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis secara rutin</li> <li>- Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah secara ngrombo (bersama-sama).</li> <li>- Optimalisasi peran perumda sebagai off-taker untuk melakukan pembelian langsung produk hortikultura ke petani dan penjualan kepada pedagang pasar</li> <li>- Pelaksanaan sidak dan monitoring harga oleh TPID dan Satgas Pangan</li> <li>- Mendorong percepatan pembangunan pasar induk untuk keterjangkauan harga</li> <li>- Mengelola gerai inflasi oleh Perumda sebagai referensi harga pasar</li> </ul>
<b>Ketersediaan Pasokan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan benih/bibit</li> <li>- Pemberian subsidi pupuk</li> <li>- intensifikasi penggunaan bibit unggul</li> <li>- Urban Farming: gerakan tanam cabai, bawang merah, dll (dibarengi dengan monitoring)</li> <li>- Pelaksanaan inovasi GENTA PATEN (Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen) di lingkungan perangkat daerah, sekolah dan masyarakat</li> <li>- Digital farming</li> <li>- Pengembangan pertanian organik</li> <li>- Penyuluhan, pembinaan kepada petani dan nelayan</li> <li>- Pemeliharaan waduk, embung untuk irigasi</li> <li>- Pengembangan Petani Terintegrasi Hulu-Hilir berbasis kawasan (kelembagaan Bersama Satu Pintu/KBS)</li> <li>- Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan)</li> <li>- Bantuan sarana penangkapan ikan berupa motor tempel dan jaring kepada kelompok nelayan melalui dana hibah</li> <li>- Fasilitasi berupa bantuan mobil berpendingin kepada kelompok pengolah pemasar/koperasi perikanan melalui dana APBN</li> <li>- Optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), terutama pada komoditas pemicu inflasi.</li> <li>- Meningkatkan penerapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk antisipasi gagal panen dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)</li> <li>- Meningkatkan peran perbankan untuk mendukung program ketahanan pangan melalui kredit ketahanan pangan dan energi.</li> <li>- Pemetaan kondisi irigasi untuk respons cepat apabila terdapat keterbatasan pasokan air</li> <li>- Mendorong percepatan pembangunan pasar induk untuk ketersediaan stok</li> </ul>
<b>Kelancaran Distribusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan arus barang masuk dan barang keluar dari Bali</li> <li>- Rehabilitasi jalan penghubung wilayah kab/kota</li> <li>- Pemanfaatan perdagangan digital (e-commerce)</li> <li>- Menyediakan alokasi subsidi ongkos angkut yang dapat dimanfaatkan oleh Perumda maupun lembaga pangan lain (seperti Bumdes, Koperasi, Bulog).</li> <li>- Mendorong akselerasi pembentukan pasar induk di Bali untuk kelancaran distribusi komoditas pangan</li> </ul>

<b>Komunikasi Efektif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan High Level Meeting, Rapat Koordinasi TPID Provinsi, Rapat Monev TPID secara berkala atau insidental</li> <li>- Pelaksanaan capacity building</li> <li>- Pemberian penghargaan bagi TPID Kab/Kota se-Bali</li> <li>- Melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi melalui berbagai media.</li> <li>- Penyebarluasan hasil pemantauan harga dan neraca pangan melalui aplikasi SiGapura</li> <li>- Publikasi harga setiap hari melalui berbagai media salah satunya Bali Media Center (BMC).</li> <li>- Menghimbau distributor pangan utama di Bali untuk menjaga margin yang wajar dan tidak menimbun pangan.</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program gerakan tanam cepat panen (GENTA PATEN) di lingkungan rumah tangga, sekolah, dan perkantoran himbauan belanja bijak</li> </ul>
---------------------------	---

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

##### **Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah**

- a. Pemerintah Provinsi Bali telah membuat kebijakan inovatif berupa Surat Edaran Pj. Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2024 tentang Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen Mendukung Pengendalian Inflasi Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Bali. Gerakan dimaksud akan berjalan efektif apabila dilakukan secara serentak dan masif mulai dari tingkat rumah tangga, sekolah dan lingkungan kantor sehingga dapat membudayakan gerakan menanam dan mencintai lingkungan sekitar. Gerakan perubahan tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi saja, namun harus dilakukan bersama-sama dengan banyak pihak melalui kolaborasi dalam konsep Penta-Helix yaitu kegiatan kerjasama antar pihak dari Pemerintah, Akademisi, Badan Usaha, Media dan Masyarakat.
- b. TPID Provinsi Bali telah melaksanakan koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID kabupaten/kota se-Provinsi Bali melalui zoom meeting dan pertemuan secara langsung. Kegiatan ini dilakukan secara berkala yaitu rakor inflasi mingguan oleh Kemendagri dan secara insidental dilakukan koordinasi antara TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c. TPID Provinsi telah melakukan tagging anggaran terhadap pengendalian inflasi di tahun 2024 sebesar Rp.123.812.775.240,- dan setiap bulan dilihat realisasi dari penganggaran dimaksud. Jika dibandingkan dengan anggaran inflasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp.122.107.547.177,- maka anggaran inflasi tahun 2024 mengalami kenaikan.
- d. Pemerintah Provinsi Bali telah membangun sistem/mekanisme pemantauan perkembangan harga komoditas serta analisis ketersediaan dan kebutuhan komoditas melalui kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan pokok strategis melalui aplikasi SiGapura. Disamping itu aplikasi SiGapura juga memiliki fitur untuk menayangkan neraca pangan untuk 20 komoditas penting dalam inflasi.
- e. Pemantauan harga dan pasokan bahan pokok penting telah dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Adapun sasaran yang dipantau adalah pasar, distributor pangan, agen dan pangkalan gas LPG 3 kg, penyosohan, horeka, dll.
- f. Komoditas beras masih meningkat karena pasokan beras belum normal dipasaran. Produksi beras menurun karena faktor cuaca, gabah masih terbatas di Bali dan Jawa

karena belum semua wilayah memasuki musim panen. Panen raya di Bali diprediksi pada bulan Maret-April 2024. Disamping itu, permintaan gabah Bali oleh pedagang dari Jawa meningkat karena kualitasnya yang bagus sehingga gabah Bali dipergunakan sebagai campuran gabah lokal untuk menghasilkan beras premium.

- g. El Nino masih berdampak di Bali sehingga masih berpotensi mengalami penurunan produksi pertanian dan ketidakstabilan harga.
- h. Telur ayam, bawang putih menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga pada triwulan I tahun 2024 sehingga perlu ada upaya-upaya (intervensi) dari segi penyediaan komoditas dan pendistribusian.
- i. Belum maksimalnya pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah surplus baik di Bali maupun luar Bali untuk ketersediaan pasokan bahan pangan baik dilakukan oleh PD maupun Perumda Pangan.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

### **Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah**

Berdasarkan hasil evaluasi diatas beberapa rekomendasi kebijakan pengendalian Inflasi Pemerintah Provinsi Bali secara rinci yaitu meliputi:

- a. Pemerintah Provinsi Bali agar tetap mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pasar murah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat khususnya untuk harga komoditas kebutuhan pokok strategis yang mengalami tren kenaikan pada TW I 2024 yaitu beras, telur ayam dan bawang putih. Kegiatan pasar murah dapat dilakukan oleh beberapa PD terkait dan bekerjasama dengan Bulog, BI dan BPD Bali.
- b. Mendorong Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan wilayah surplus baik di Bali maupun luar Bali untuk ketersediaan pasokan bahan pangan baik dilakukan oleh PD maupun Perumda Pangan. Mendorong Paiketan Perumda Pangan se-Bali untuk melaksanakan langkah-langkah konkrit pengendalian inflasi dan Pemprov. Bali agar dapat memfasilitasi kegiatan paiketan perumda pangan dimaksud.
- c. Mendorong optimalisasi aplikasi SiGapura terkait pengolahan data dan analisis sehingga dapat membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang tepat dalam pengendalian inflasi.
- d. Meningkatkan penyaluran beras SPHP ke masyarakat dan jagung SPHP ke peternak, yang didukung dengan peningkatan ketersediaan stok melalui optimalisasi hasil panen.
- e. Melaksanakan sidak harga pasar dan pemantauan distribusi bahan pangan pokok secara berkala khususnya pmenjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dengan menggandeng Satgas Pangan Provinsi Bali. Hal ini perlu dilakukan mencegah para spekulan bermain di lapangan.
- f. Mendorong pelaksanaan Genta Paten pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya ketahanan pangan di Provinsi Bali.